

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Bolivar Venezuela merupakan salah satu negara yang terletak di Amerika Selatan dengan bentuk pemerintahan Republik Federal. Negara yang telah merdeka sejak tahun 1811 dan baru mendapat kemerdekaan resmi pada 1845 ini merupakan salah satu negara yang terkenal karena sumber daya alam yang melimpah. Berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, bijih besi, intan, emas dan pertanian seperti Jagung dan beras mudah ditemukan di negara ini. Melimpahnya sumber daya alam membuat Venezuela menjadikan kekayaan alam yang ada di negaranya sebagai komoditas ekspor termasuk minyak bumi yang menyumbang 98% ekspor Venezuela (Soyomukti, Revolusi Bolivarian, 2007). Banyaknya cadangan minyak yang tersimpan di negara ini membuat Venezuela menduduki peringkat keenam sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia yang diperkirakan tidak akan habis sampai 100 tahun kedepan (Federal Research Division, 2005).

Sejak kemerdekaannya yang secara resmi ditetapkan pada tahun 1845 membuat Republik Bolivar Venezuela telah dipimpin oleh banyak Presiden. Salah satu Presiden Venezuela yang paling dikenal adalah Hugo Rafael Chavez yang telah memimpin Venezuela selama 13 tahun. Selama memimpin Venezuela, Hugo Rafael Chavez menerapkan pandangan serta kebijakan sosialis yang diyakininya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan sebuah negara (VOA Indonesia, 2013). Sosialisme sendiri

merupakan suatu pandangan yang mencakup aspek politik, ekonomi dan sosial dimana sistem ini menekankan pada kepemilikan berbagai macam faktor-faktor produksi oleh sebuah negara. Tujuan dari kepemilikan faktor produksi oleh negara ini agar kesejahteraan rakyat dapat merata dan terjamin oleh pemerintah (Ashari, 2015).

Banyaknya sumber daya alam yang ada di Venezuela membuat Hugo Rafael Chavez berusaha untuk menggunakan potensi yang dimiliki oleh Venezuela semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat dan membuat segala aspek kehidupan rakyatnya menjadi lebih baik. Selain bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Venezuela Hugo Chavez juga mempunyai keinginan untuk mengubah sistem ekonomi negara dari sistem pasar ke sistem kooperatif yang dikontrol oleh negara. Sistem kooperatif sendiri merupakan sistem ekonomi yang menggabungkan antara politik dan ekonomi dimana pemerintah banyak berperan dalam mengatur perekonomian dalam negara tersebut (Owen, 2007). Selama memimpin Venezuela Hugo Chavez menerapkan berbagai kebijakan yang disukai rakyat seperti mengadakan subsidi di berbagai bidang, kredit tanpa bunga bagi rakyat miskin serta melakukan nasionalisasi perusahaan (Andrianto, 2012).

Selama memimpin Venezuela Hugo Chavez banyak menerapkan kebijakan-kebijakan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan yang memihak kepada rakyat kecil ini dapat terlaksana dengan baik karena perekonomian Venezuela yang saat itu sedang naik dikarenakan harga minyak global yang menjadi sumber utama pemasukan kas negara sekaligus menjadi sumber dana utama untuk membiayai berbagai kebijakan yang diterapkan Hugo Chavez sedang berada pada harga tinggi (Muravchik, 2019). Dengan berbagai

kebijakan dan program yang dibuat oleh Hugo Chavez untuk kesejahteraan rakyatnya, perekonomian Venezuela berangsur membaik. Pada 2006 tingkat GDP (Gross Domestic Product) meningkat sebesar 9,3% menjadi 183,5 miliar US Dollar yang pada saat itu merupakan GDP yang tertinggi di wilayah Amerika Selatan.

Selain dibuktikan dengan meningkatnya Gross Domestic Product pendapatan pemerintah naik dari 17,4% menjadi 30% serta hutang luar negeri menurun hingga hanya menyisakan 11,4% dari total GDP pada tahun itu. Meningkatnya GDP Venezuela yang tertinggi di wilayah Amerika Selatan membuat para investor dari negara lain tertarik untuk menanamkan modal di Venezuela yang terbukti dengan naiknya investasi pada 2007 sebesar 4,4% dari total GDP (Weisbrot & Sandoval, 2008). Naiknya perekonomian Venezuela juga diikuti dengan turunnya angka pengangguran. Pada 2006 angka pengangguran di Venezuela menurun sebesar 10,1% mengalahkan Amerika Serikat yang pada tahun itu hanya turun 9,7% (Soyomukti, Hugo Chavez vs Amerika Serikat, 2008).

Diterapkannya kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat membuat perekonomian Venezuela perlahan-lahan ikut meningkat. Berbagai kebijakan yang diterapkan pada masa kepemimpinan Hugo Chavez dapat terlaksana dengan baik karena adanya dana yang mengalir dari keuntungan penjualan minyak bumi yang merupakan sumber ekspor utama negara Venezuela. Pada tahun 2004 sebesar 1,5 miliar US Dollar keuntungan dari perusahaan Petroleum de Venezuela (PDVSA) digunakan Hugo Chavez untuk membiayai berbagai subsidi atau kebijakan yang diberlakukan pada masa kepemimpinannya dan pada tahun 2005 anggaran subsidi serta kebijakan yang diberlakukan oleh Hugo Chavez

dinaikan menjadi 4 miliar US Dollar dengan tujuan untuk lebih mensejahterakan rakyat (Kozloff, 2006).

Nasionalisasi perusahaan Petroleum de Venezuela membuat keuntungan yang didapat dari hasil penjualan minyak bumi sepenuhnya adalah milik pemerintah Venezuela. Dengan adanya nasionalisasi perusahaan PDVSA yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela membuat Venezuela sendiri mendapat keuntungan yang sangat besar karena pemerintah mendapatkan 100% keuntungan dari hasil penjualan minyak. Keuntungan yang didapat Venezuela setelah melakukan nasionalisasi PDVSA berbanding terbalik dengan Amerika Serikat. Sebagai salah satu negara yang menanamkan modal lewat perusahaan-perusahaan internasionalnya keputusan Hugo Chavez untuk melakukan nasionalisasi Petroleum de Venezuela justru membuat beberapa perusahaan multinasional asal Amerika Serikat mengalami kerugian (Andrianto, 2012).

Turunnya harga minyak global pada tahun 2012 yang disebabkan oleh melambatnya perekonomian di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, China, dan beberapa negara di Uni Eropa membuat permintaan minyak mentah dunia menurun hingga berdampak pada turunnya harga minyak global (Cahyono, 2019). Menurunnya harga minyak global dari 110\$ per barrel menjadi 88\$ per barrel dibarengi dengan menurunnya permintaan minyak yang menurun sekitar 1 juta barrel setiap harinya membuat negara-negara yang bergantung pada sektor minyak mengalami kerugian. Begitu juga dengan Venezuela yang 98 % eksportnya bergantung pada minyak bumi. Penurunan harga minyak dunia tersebut tidak berjalan lama, ketika perekonomian negara-negara besar kembali membaik harga minyak dunia juga mengalami kenaikan. Pada awal 2013 harga minyak

mentah kembali mengalami kenaikan menjadi 92,41\$ per barrel (U.S Energy Information Administration, 2012).

Naiknya harga minyak global membuat perekonomian negara-negara yang bergantung pada sektor minyak juga ikut membaik. Namun tidak dengan Venezuela. Menurunnya GDP sebesar 10 miliar US Dollar pada 2013 serta banyaknya kebijakan yang harus dibiayai dimana kebijakan tersebut sifatnya hanya sekedar untuk mencari dukungan atau popularitas sehingga Hugo Chavez dapat mempertahankan posisinya sebagai Presiden membuat Venezuela harus melakukan pinjaman luar negeri sebesar hampir 50 miliar USD kepada China (Ika, 2017). Membaiknya harga minyak global tidak lantas membuat perekonomian negara tersebut ikut membaik. Sedikit demi sedikit perekonomian Venezuela justru mengalami penurunan yang berakhir dengan adanya inflasi yang hingga saat ini belum terselesaikan.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut **“Mengapa terjadi krisis ekonomi di Venezuela pada akhir pemerintahan Hugo Chavez”**

B. Kerangka Berfikir

Dalam menganalisa permasalahan pada bagaimana kemunculan krisis Venezuela di akhir pemerintahan Hugo Chavez, penyusun menggunakan konsep korupsi politik dan sanksi.

1. Korupsi Politik

Korupsi merupakan sebuah bentuk ketidakjujuran atau kegiatan kriminal yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang mempunyai otoritas

dalam suatu negara. Korupsi seringkali dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Samuel Huntington dalam jurnal *The Impact of Corruption on Regime Legitimacy* oleh Mitchell Seligson korupsi adalah perilaku pejabat publik yang tidak sejalan dengan norma yang berlaku di masyarakat untuk menghasilkan keuntungan pribadi (Seligson, 2002). Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi ini tidak selalu bertujuan untuk keuntungan pribadi individu namun bisa juga untuk kepentingan beberapa pihak seperti yang terjadi di beberapa negara maju bahwa kasus korupsi yang dilakukan adalah untuk membiayai partai politik. Korupsi sendiri bisa dilakukan dengan cara penyuapan, pemerasan atau penggelapan dengan skala yang bermacam-macam.

Korupsi dibedakan menurut skala yang dilakukannya. Skala terkecil dari korupsi dinamakan Petty Corruption di mana korupsi yang terjadi dilakukan oleh pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Contoh dari Petty Corruption ini adalah polisi lalu lintas yang menerima suap dari masyarakat yang melanggar lalu lintas. Skala kedua adalah Grand Corruption yang merupakan korupsi besar. Korupsi besar ini didefinisikan sebagai korupsi yang terjadi pada tingkat pemerintah. Korupsi besar ini biasanya terjadi di negara-negara otoriter atau diktator. Selain itu Grand Corruption juga bisa terjadi di negara dengan sistem pengawasan korupsi atau negara dengan undang-undang korupsi yang rendah. Skala terakhir dari korupsi adalah Systemic Corruption yang merupakan korupsi yang terjadi karena lemahnya suatu proses atau pemerintahan dalam suatu negara ataupun organisasi (IMF, 1998).

Adanya korupsi yang terjadi di sebuah negara membuat negara tersebut dapat terkena berbagai macam dampak dari berbagai aspek. Dalam aspek ekonomi suatu negara yang pemerintahnya terlibat kasus korupsi akan membuat perekonomian di negara tersebut menurun. Penurunan ekonomi yang disebabkan oleh korupsi bisa dilihat melalui tingginya angka kesenjangan sosial atau dalam segi bisnis tingginya tingkat korupsi di suatu negara akan berdampak pada turunnya investasi di negara tersebut (Dimant & Tosato, 2017). Sedangkan dalam segi pembangunan adanya korupsi juga bisa berdampak pada proyek pembangunan fasilitas negara yang menurun karena uang yang digunakan untuk membangun fasilitas umum digunakan untuk keperluan pribadi atau kelompok sehingga bisa menghambat pembangunan jangka panjang pada suatu negara (Santoso, 2011).

Korupsi di Venezuela sudah sering terjadi termasuk pada masa kepemimpinan Hugo Chavez. Walaupun Venezuela sendiri telah menerapkan pedoman serta undang-undang yang ketat untuk mencegah korupsi namun kasus korupsi yang terjadi di negara tersebut tetaplah tinggi. Adanya sentralisasi dalam pemerintahan Venezuela pada era Hugo Chavez menciptakan akuntabilitas yang lebih rendah untuk melakukan korupsi. Hal inilah yang membuat korupsi di Venezuela berkembang terus menerus. Berbagai penyimpangan dan korupsi yang terjadi di Venezuela seperti membeli kesetiaan kelompok militer dan banyaknya kasus penyuapan membuat korupsi menjadi hal yang wajar dilakukan oleh elit politik Venezuela. Partai politik, parlemen, pengadilan dan kepolisian dianggap sebagai lembaga-lembaga tempat praktik korupsi di Venezuela tumbuh subur. Hal ini dibuktikan

dengan naiknya angka korupsi pada tahun 2007 hingga 2010 (Loughman & Sibery, 2011).

Tingginya angka korupsi yang terjadi di Venezuela pada masa kepemimpinan Hugo Chavez berdampak langsung terhadap turunnya angka investasi di Venezuela. Banyak perusahaan asing yang memilih untuk tidak menanamkan modalnya di Venezuela karena investor lebih suka untuk menanamkan modal di negara yang bersih agar keuntungan perusahaan menjadi tinggi dan tidak terganggu oleh permasalahan politik di negara yang di investasi (Detik News, 2019). Naiknya angka korupsi pada tahun 2007 hingga 2010 berdampak langsung pada turunnya investasi di Venezuela. Tercatat investasi menurun dari 30.34% pada 2007 menjadi 21,9% pada tahun 2010 (CEIC, 2017). Tingginya angka korupsi yang terjadi di Venezuela, baik korupsi yang dilakukan oleh Hugo Chavez maupun oleh pejabat pemerintahan membuat perekonomian Venezuela semakin memburuk.

2. Sanksi Internasional

Menurut dewan keamanan PBB dalam jurnal *Economic Sanctions and US Foreign Policy* sanksi merupakan tindakan yang diambil oleh satu atau sekelompok negara maupun organisasi internasional terhadap negara lain. Sanksi juga bisa dijatuhkan oleh organisasi internasional yang merasa bahwa negara tersebut telah melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Sanksi diberlakukan untuk membuat negara yang melanggar hukum internasional dapat mengakhiri pelanggaranannya atau dapat mengakhiri kebijakannya yang dianggap merugikan negara lain (Hufbauer & Schott, 1985). Terdapat 3 jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam pemberian sanksi internasional, yaitu

sanksi ekonomi, sanksi diplomatik, dan sanksi militer. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan pada suatu negara terhadap negara lain biasanya berupa pembatasan atau pemutusan hubungan perdagangan. Sanksi diplomatik merupakan sanksi yang sering kali dipakai ketika hubungan antar kedua negara sedang memanas dimana sanksi yang diberikan berhubungan dengan hubungan politik kedua negara. Sanksi ini bisa dilakukan dengan cara menarik kembali Duta Besar untuk pulang ke negara asalnya atau melakukan pengusiran terhadap Duta Besar. Sedangkan sanksi militer merupakan sanksi yang diberikan oleh negara kepada negara pelanggar melalui jalan militer. Sanksi militer ini biasanya ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap negara-negara yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional seperti pelanggaran hak asasi manusia dan dianggap membahayakan bagi perdamaian dunia (European Commission, 2015).

Sanksi akan diterapkan oleh negara ataupun sekelompok negara terhadap negara lain sebagai bentuk hukuman karena telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Pelanggaran hukum internasional yang akan dijatuhi sanksi merupakan pelanggaran hukum yang biasanya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di suatu negara ataupun negara yang dianggap telah merugikan negara lain. Dalam kasus ini Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap Venezuela berupa sanksi ekonomi. Sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela ini dikarenakan Amerika merasa dirugikan atas keputusan Hugo Chavez untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan Amerika Serikat seperti salah satunya adalah

melakukan nasionalisasi perusahaan. (Wiseman & Beland, 2010).

Dengan diterapkannya sanksi oleh negara terhadap negara lain membuat negara yang terkena sanksi menerima banyak kerugian. Kerugian yang dialami oleh negara yang mendapatkan sanksi bisa terjadi di berbagai aspek. Dalam aspek ekonomi sanksi dapat menyebabkan perekonomian di sebuah negara mengalami penurunan. Penurunan ekonomi yang terjadi di suatu negara ini akan berdampak langsung ke rakyat dimana rakyat akan merasa kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya (O'Driscoll, 2017). Dalam kasus ini sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela berdampak langsung pada perekonomian Venezuela. Dan membuat Venezuela yang saat itu perekonomiannya sedang menurun akibat menurunnya harga minyak semakin terpuruk hingga rakyat Venezuela merasa kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat pada saat ekonomi venezuela sedang menurun membuat krisis dan inflasi tidak dapat terhindarkan (Federation of American Scientist, 2019).

Krisis ekonomi yang terjadi di Venezuela dapat dijelaskan dengan konsep korupsi politik dan sanksi internasional. Dua konsep ini mampu untuk menjelaskan munculnya krisis ekonomi di Venezuela pada akhir pemerintahan Hugo Chavez. Adanya korupsi politik membuat ekonomi Venezuela tidak dapat berjalan dengan baik ketika terjadi penurunan harga serta permintaan minyak yang kemudian membuat pemerintah venezuela tidak mampu untuk menyelamatkan devisa anggaran. Sedangkan sanksi internasional yang diberikan oleh Amerika Serikat membuat kondisi ekonomi Venezuela yang mengalami

penurunan karena harga dan permintaan minyak dunia yang menurun semakin membuat perekonomian Venezuela mengalami krisis.

C. Hipotesa

Dari rumusan masalah serta kerangka pemikiran yang telah dituliskan sebelumnya maka hipotesis yang dapat digunakan dalam terjadinya krisis ekonomi di Venezuela pada akhir pemerintahan Hugo Chavez dikarenakan adanya dua faktor utama, yaitu :

1. Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela serta pembiayaan kebijakan yang bertujuan untuk menaikkan pamor Hugo Chavez berakibat pada ketidak mampuan negara dalam membayar hutang.
2. Sanksi ekonomi berupa embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat berakibat krisis.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa krisis Venezuela bisa terjadi serta untuk menambah kekayaan khazanah yang berkaitan dengan krisis yang sedang berlangsung di Venezuela.

E. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini tempat yang dipilih sebagai sumber penelitian adalah negara Venezuela yang terletak di wilayah Amerika Selatan pada masa kepemimpinan Hugo Chavez yang menjabat dari tahun 1999 hingga 2013.

F. Metode

1. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif.

2. Sumber data dan Jenis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dokumen dari situs resmi atau situs berita sebagai sumber utama penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka sendiri dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan krisis yang terjadi di Venezuela.
4. Teknik Analisa Data
Data yang didapatkan oleh penulis akan dianalisis dengan analisis kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun kata yang diucapkan oleh narasumber.

G. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih mudah dipahami maka penulis membagi penelitian tentang kemunculan krisis Venezuela pada masa kepemimpinan Hugo Chavez kedalam sistematika penulisan yang berisi 5 bab.

1. Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode, serta sistematika penulisan.
2. Bab dua membahas tentang ketergantungan Venezuela terhadap minyak, profil Hugo

Chavez dan kebijakan minyak era Hugo Chavez.

3. Bab tiga membahas tentang krisis serta korupsi yang terjadi di Venezuela.
4. Bab empat membahas tentang adanya campur tangan Amerika Serikat terhadap krisis yang terjadi di Venezuela.
5. Bab lima berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.